

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Setiap kejahatan yang dilakukan pasti mendapatkan konsekuensi sesuai dengan apa yang diperbuatnya. Hukum Pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkannya kepada pelaku. Hal demikian menempatkan hukum pidana dalam pengertian hukum pidana materiil.<sup>1</sup>

Pidana adalah reaksi atas delik yang berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik. Menurut R. Soesilo, dirumuskan bahwa hukum adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis, kepada orang-orang yang melanggar undang-undang hukum pidana. Pidana sebagai reaksi atas delik yang dijatuhkan harus berdasarkan pada vonis hakim melalui sidang peradilan atas terbuhtinya perbuatan pidana yang dilakukan. Apabila tidak terbukti bersalah maka tersangka harus dibebaskan.<sup>2</sup> Adapun mengenai bentuk pidana yang dijatukan utamanya mengacu pada KUHP. Namun untuk hukum pidana khusus, ternyata ada perluasan atau penambahan bentuk atau jenis pidana tambahan diluar yang termaktub dalam KUHP. Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP (WvS) telah menetapkan jenis-jenis pidana yang termaktub dalam pasal 10. Diatur dua pidana yaitu pidana

---

<sup>1</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafiks, hlm.6.

<sup>2</sup> Ibid, hlm.9

pokok dan pidana tambahan . Pidana pokok terdiri atas empat jenis pidana yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan terdiri atas pencabutan beberapa hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.<sup>3</sup>

Setiap orang yang terbukti melakukan kejahatan akan dimasukkan dalam Lembaga pemasyarakatan yang merupakan suatu lembaga untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim.

System pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam secara berangsur angsur dipandang sebagai suatu system dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi narapidana dan anak pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari system kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan.

Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan kosepsi umum mengenai pemedanaan. Narapidana bukan saja objek

---

<sup>3</sup> Ibid, hlm.10

melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban – kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana. Pemidaan adalah upaya penyadaran narapidana atau anak pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.<sup>4</sup>

Menurut pasal 2 Undang Undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, tujuan pemasyarakatan adalah sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindakan pidana sehingga dapat kembali diterima di masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab. Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa fungsi Pemasyarakatan adalah menyiapkan warga binaan pemasyarakatan (narapidana, anak didik dan klien pemasyarakatan ) agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab.

---

<sup>4</sup> Rohmad Taufiq , 2018, *Meningkatkan Sistem Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Sebagai Upaya Untuk Memaksimalkan Penegakkan Hukum* , Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Yudisia, Vol. 9, No. 1, hlm. 203.

Dalam praktek pelaksanaannya kebanyakan narapidana memperoleh potongan masa tahanan yang bisa kita sebut dengan remisi. Dengan pemberian remisi narapidana tidak sepenuhnya menjalani masa hukuman pidananya. Hal tersebut merupakan hadiah yang diberikan pemerintah kepada narapidana. Dalam memperoleh remisi narapidana harus memenuhi beberapa persyaratan yang intinya mentaati peraturan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam realitas hukum yang ada seperti yang terdapat di Lapas Kota Malang, tidak sedikit napi yang setelah keluar dari Lapas kembali lagi melakukan perbuatan jahatnya dan hal ini kembali dilakukannya dalam hitungan bulan. Salah satu kasus yang pernah terjadi yaitu sindikat pencuri sepeda motor asal Trenggalek yang tertangkap telah melakukan pencurian di Blitar dan setelah tertangkap dan di periksa, salah satu pelaku sudah pernah masuk penjara karena kasus yang sama. Hal ini membuktikan bahwa tiadak adanya efek jera setelah menjalani masa hukuman sebelumnya, hal ini dibuktikan dengan kembalinya pelaku melakukan kejahatan yang sama. Banyaknya remisi yang didapat itu berdasarkan Keputusan Presiden No 174 Tahun 1999 tentang Remisi. Di Keppres itu, seorang nara pidana dalam satu tahun bisa mendapatkan banyak jenis remisi, seperti remisi 17 Agustus, remisi hari raya dan remisi tambahan.

Melansir dari Tribunnews.com, salah satu kasus yang pernah terjadi di kota malang adalah seorang jambret yang tertangkap setelah 4 kali dipenjara dengankasus yang sama. Hal ini dapat membuktikan bahwa dengan adanya kasus

yang terjadi timbul ketidak insyafan dari pelaku yang melakukan perbuatan penjambratan.<sup>5</sup>

Banyaknya jenis remisi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana akan mengurangi lama masa tahanannya. Melihat realitas yang terjadi saat ini akankah mengurangi tingkat kejahatan ataukah mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Maka dari itu penulis tertarik untuk membuat sebuah penelitian mengenai Dampak Pemberian Remisi terhadap Pengurangan Tindak Pidana dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Malang)

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dibuat dengan tujuan untuk memecahkan masalah pokok yang timbul secara jelas dan sistematis. Perumusan masalah dimaksudkan untuk lebih menegaskan masalah yang akan diteliti, sehingga dapat ditentukan suatu pemecahan masalah yang tepat dan mencapai tujuan atau sasaran sesuai yang dikehendaki.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, perumusan masalah dalam penulisan hukum ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah dasar pertimbangan pemberian remisi terhadap residivis ?

---

<sup>5</sup> Movhammad Rifki Ridgar Hidayatullah, *Jambre Handphone di Kota Malang, Residivis Tertangkap dan Masuk Penjara Keempat Kali*, diakses di <https://suryamalang.tribunnews.com/2019/02/14/jambret-handphone-di-kota-malang-residivis-tertangkap-dan-masuk-penjara-keempat-kali>, diakses pada 1 Oktober 2019.

2. Bagaimana dampak pemberian Remisi bagi narapidana dan narapidana recidive ?
3. Bagaimanakah relevansi pemberian remisi terhadap residivis dikaitkan dengan tujuan pembedanaan ?

### **C. Tujuan Penulisan**

Tujuan merupakan target yang ingin dicapai sebagai pemecahan atas masalah yang diteliti. Tujuan penelitian diperlukan karena berkaitan erat dengan perumusan masalah dalam penelitian dan untuk memberikan arah yang tepat dalam penelitian agar dapat berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dasar pertimbangan pemberian remisi terhadap residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kota Malang
2. Mengetahui dampak pemberian remisi bagi narapidana dan narapidana recidive
3. Mengetahui relevansi pemberian remisi terhadap residivis dikaitkan dengan tujuan pembedanaan

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis



- a. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum di Indonesia pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya
- b. Memberikan kontribusi terhadap peneliti lain yang melakukan penelitian hukum pidana

## 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan tentang keefektifitasan pemberian remisi terhadap Narapidana yang kembali melakukan pengulangan tindak pidana
- b. Memberikan bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan pemberian remisi terhadap pengulangan tindak pidana

## **E. Kegunaan Penelitian**

Atas dasar maksud, tujuan dan alasan yang penulis uraikan di atas maka, penulis berharap peneitian ini akan memiliki kegunaan sebagai berikut :

### 1. Bagi penulis

Peneitian ini dapat berguna sebagai penambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang permasalahan yang di kaji oleh penulis, sekaligus sebagai syarat unuk penulisan tugas akhir dan menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

### 2. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana penambah wawasan maupun referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini

### 3. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi masyarakat dalam pemahaman mengenai Remisi dan Pengulangan tindak Pidana

## **F. Metode Penulisan**

### **1. Pendekatan**

Penelitian hukum ini termasuk dalam penelitian hukum sosiologis dengan bentuk penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menilai keefektifitasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan dilakukan dengan mengadakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan

### **2. Penetapan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kota Malang. Penentuan lokasi penelitian ini didasarkan pertimbangan bahwa pada daerah hukum tersebut sudah ada perkara yang diadili mengenai napi yang melakukan pengulangan tindak pidana .

### **3. Jenis Data**

#### **a. Data Primer**

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan atau wawancara maupun dengan mengajukan pertanyaan secara tertulis

#### **b. Data Sekunder**

Data yang diperoleh dari penelitian bahan pustaka dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam peraturan perundangan,



buku-buku dan artikel yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti, antara lain :

1. Bahan Hukum Primer Meliputi :

- Undang Undang No. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan pemasyarakatan
- Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

2. Bahan Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku, jurnal, makalah, tulisan yang terkait

3. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, jurnal, surat kabar dan lain sebagainya

**G. Sistematika Penulisan.**

Sistematika Penulisan terdiri dari IV Bab, yakni :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab I ini berisi latar belakang yang menjadi dasar maupun alasan pemikiran penulis untuk mengangkat masalah yang berkaitan dengan persoalan yang sedang

dibahas, serta dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, metode penelitian dan sistematika penelitian.

## **BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG REMISI DALAM SISTEM PEMIDANAAN**

Dalam BAB II ini penulis menguraikan mengenai tinjauan umum secara teoritis

## **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam BAB III ini penulis akan menjelaskan tahapan penyelesaian dari permasalahan yang muncul, dalam hal ini disajikan pembahasan mengenai jawaban atas perumusan masalah yang diungkapkan.

## **BAB IV : PENUTUP**

Dalam BAB IV ini berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran dari pembahasan serta saran-saraan yang disampaikan oleh penel

